

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alex T Tobing dan Bambang Setiawan. 2012, *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Ali Wisnubroto. 2000. *Praktik Peradilan Pidanan (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, P.T Galasi Pupa Mega, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesian*. ed.2 cet.12, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta
- Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua (Revisi)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono. 2011, *Hukum Acara Pidanan & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini, Jakarta.
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nur Yanto. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Mitra Wancana Media, Jakarta.
- P Joko Subagyo. 2009. *Hukum Laut Indonesia cetakan ke empat*. Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F Laminting, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet,4, P.T Citraa Aditya Bakhti, Bandung.

Plus, A Partanto, dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola, Surabaya.

Sherodji Hari. 2010. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI PERS, Jakarta.

SR. Sianturi, 1996. *Asas-Asa Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHMPH, Jakarta.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN- KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal Fishing* (*Illegal Fishing*).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2009 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Pengelolaan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023.

Peraturan Dirjen PSDKP No 70/DJ-PSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penangkapan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor:1/SK-DKP.3/I/2019 Tentang Penunjukan Personil Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Bidang KRL dan Pengawasan SDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kegiatan forum Koordinasi Penanganan TPP bidang PRL dan PSDKP, DKP Sumbar 2019.

### **C. Jurnal**

Abdul jaelani. 2014. "Upaya Penegakan dan Memberantas dan Pemberantasan *Illegal Fishing* Dalam Pembangunan Proses Maritim di Indonesia" *jurnal supremasi hukum. vol.3 no. 1 juni, 2014.*

Arisandi. 2016. "Inkonsisten Kebijakan Penggunaan Jaring *Trawl*" *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (ISSN.2338445X), NO. 1, Maret 2016*

Ketut Darmika. 2015. "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KPI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan" *Jurnal Hukum dan Peradilan, vol 4 no 3 tahun 2015.*

Nurliah Nurdin. 2010. "Kajian Efektifitas Kebijakan Pada Kasus Destructive Fishing Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Pada Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus Pada Pulau Karanrang Kabupaten Pengkep Sulawesi Selatan)" *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 10 no.2, Agustus 2010.

Rodrigo f. Y Siwu. 2019. " Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing Menurut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015" *Lex Et Societatis Vol. VII/ No. 1/Jan/2019*

Sandra Devita Kusumaningsari, Marsetio, Yusnaldi, 2017, Peran Penegak Hukum Terhadap Penggunaan Bom Ikan oleh Nelayan di Perairan Teluk Lampung, *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol 3 No 1 2017

Simela vitor muhamad. 2012. "Illegal Fishing di perairan Indonesia Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan" *Political vol.3.No 1 Mei 2012*

Tommy Sihotang, 2006, Masalah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* dan Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan, *Jurnal Keadilan*, Vol 4, No2 Tahun 2006 hlm 487

#### **D. Web**

Oki Pratama, konservasi perairan sebagai upaya menjaga potensi kelautan dan perikanan indonesia, 2020 <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.

<https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis-detail/902-apa-itu-destructive-fishing>

